

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA GUNUNGSITOLI

Herman Jaya Harefa *

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum **

Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H **

Pembangunan yang ada dikota Gunungsitoli tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Hal ini menjadi penting karena proses tersebut akan terjadi suatu bentuk negosiasi kebijakan yang berdasarkan skala prioritas. Setiap kegiatan yang dirasa perlu sebisa mungkin akan dituangkan didalam APBD.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala/peristiwa kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambi masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian ini.

Dana APBD dalam pelaksanaannya memiliki tujuan utama dalam penglolaan keuangan yaitu tanggungjawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan daya guna dan pengendalian. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara kentuan dan keterlibatan masyarakat menyusun dan mengajukan rencana Perda tentang RPJPD dan RPMJD kepada DPRD.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota Gunungsitoli adalah keterbatasan anggaran ditengah banyaknya program kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan secara bersamaan sehingga asas pemerataan yang berkeadilan dalam melaksanakan pembangunan sulit terwujud dan harus dilakukan kemudian secara prasioal di setiap daerah. Pemerintah bersama DPRD harus bisa saling mamahami dalam menyusun RKPD dan bersama-sama mensosialisasikan tentang kendala tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial

Kata Kunci : Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Pemerintah Daerah

* Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan